

ANALISIS FAKTOR PEMBERIAN BIMBINGAN DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMUDA DI KOTA BANJAR

Aji Kurniawan¹, Ahmad Juliarso², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : aji_kurniawan@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kota Banjar. Permasalahan utama dalam penelitian ini 35asyar belum optimalnya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh DPD KNPI Kota Banjar sebagaimana yang diharapkan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh 35asyaraka pembinaan yang digunakan sebagai alat analisis dalam kajian ini, yang keseluruhannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan belum mencapai taraf optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 35asyar pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD KNPI Kota Banjar belum mampu mengimplementasikan program pembinaan yang selaras dengan kebutuhan dan eksistensi OKP. Hambatan-hambatan utama yang diidentifikasi meliputi tidak adanya kejelasan program kerja yang secara spesifik ditujukan untuk pembinaan OKP, lemahnya koordinasi antar pengurus, serta disharmoni komunikasi internal di tubuh DPD KNPI Kota Banjar. Faktor-faktor tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan fungsi kelembagaan KNPI dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membina generasi muda. Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, DPD KNPI Kota Banjar berupaya untuk melakukan penataan ulang terhadap struktur dan mekanisme kerja internal organisasi. Langkah ini mencakup perbaikan pola komunikasi antar anggota serta perumusan 35asyara arah 35asya organisasi agar sesuai dengan visi dan misi pembinaan kepemudaan. Penataan internal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan OKP ke depan, sehingga peran KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan dapat lebih dirasakan manfaatnya secara luas oleh 35asyarakat, khususnya para pemuda di Kota Banjar.

Kata Kunci : *pembinaan, organisasi kepemudaan, KNPI, organisasi kemasyarakatan, pemuda, Kota Banjar.*

PENDAHULUAN

Organisasi Merupakan sebuah sistem budaya yang sudah ada sejak zaman awal manusia. Sejak zaman dahulu manusia memiliki sebuah sistem kelompok seperti melakukan kegiatan berburu. Organisasi merupakan suatu kegiatan, yang mengatur hubungan-hubungan antara sistem terbuka dan lingkungannya.

Demikian juga Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dilihat sebagai sebuah sistem yang hidup dan terbuka, melihat sejarah Indonesia mengenai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mempunyai sifat yang terbuka dalam jaringan yang hidup tersebut, demikian dalam dunia yang berkembang begitu cepat, Anthony Giddens Mengantarkan dunia yang berlari, atau dalam kategori Thomas L. Friedman dunia yang datar karena informasi yang berpindah cepat seolah melampaui ruang dan waktu. Dalam dunia seperti ini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) perlu mencermati dirinya kembali dan menafsirkan ulang akan jati diri yang sesungguhnya di pentas kebangsaan (Bolo et al., 2013).

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berada di Indonesia muncul karena cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai hak segala bangsa. Kemerdekaan membawa bangsa ini menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan berdaulat. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang lahir dari perjuangan

keindonesiaan, tentu juga ingin menjunjung nasionalisme sebagaimana yang dicita-citakan sedari awal.

Adanya organisasi kemasyarakatan dan pemuda selain menjadi garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan, yaitu menjadi salah satu bagian dalam pembangunan daerah tersebut. Pembagian wewenang daerah sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan lokal dan masyarakat yang diayomi. Bagaimana tentang mencapai pemerataan kemakmuran masyarakat sampai ke pelosok, tentang nilai dasar falsafah negara yakni Pancasila dapat di terapkan dan dirasakan secara adil ke seluruh masyarakat. Kemudian tentang memberikan kesempatan untuk kemandirian daerah dalam menghidupkan daerahnya masing-masing. Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas rakyat di isi oleh kalangan pemuda atau usia produktif. sampai 68%, data ini tentunya membuktikan bahwa masa depan Indoneisa terletak pada tangan pemuda dimana pemuda adalah “asset” negara yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ir Soekarno, Proklamator RI, “Berikan 10 pemuda maka akan aku guncang dunia” artinya pemuda adalah kunci/ pembawa perubahan, (*Agent of change*). (Arifin & Mh, 2005)

Dengan melihat perkembangan organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Indonesia yang cenderung menunjukan

trend meningkat, dapat menjadi bukti bahwa saat ini, organisasi telah menjadi salah satu kebutuhan dari kehidupan masyarakat. Dalam organisasi orang ingin memuaskan kebutuhannya. Orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi dengan perannya. Hal ini digambarkan oleh Gelzel dan Guba dalam pendekatannya mengenai model sistem sosial. Keseimbangan antara manusia dengan organisasi perlu dijaga dalam suatu bentuk status quo. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan adanya ekuilibrium(keseimbangan) antara kebutuhan manusia sejauh itu seimbang dengan organisasi. Hubungannya akan memuaskan dan berlanjut pada level yang produktif. (Arifin & Mh, 2005)

Selain itu, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur dan menilai kedewasaan demokrasi yang terjadi di suatu negara. Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin secara konstitusi. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Bereksprei di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia"

Kehadiran Organisasi Masyarakat dan Pemuda (OKP) termasuk sebagai wujud dari kebebasan berkumpul dan berorganisasi bagi masyarakat sebagai aktualisasi dari pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana di atur oleh Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*

Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang berada di setiap daerah, senantiasa berada dibawah pembinaan dari KNPI Begitupun dengan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang berada di Kota Banjar menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari pemerintah Kota Banjar melalui KNPI selaku pembina yang berada di daerah.

Dengan banyaknya Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Kota Banjar, tentunya merupakan potensi yang besar sebagai sarana dan media dalam mengangkat kaum muda untuk terlibat aktif dalam berbagai pembangunan yang dilakukan di Kota Banjar. Namun, pada kenyataannya Organisasi Masyarakat dan Pemuda (OKP) di Kota Banjar seringkali menimbulkan kesan dan penilaian negatif dari masyarakat. Ini tentunya akibat dari tindakan dan aktivitas dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang meresahkan kehidupan masyarakat.

Munculnya penilaian dan stigma negatif dari masyarakat atas keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Kota Banjar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Salah satunya dapat diakibatkan dari kurangnya atau lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar. Sementara, kewenangan dalam pembinaan organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) tidak hanya menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini KNPI Kota Banjar sebagai wadah setiap OKP.

Dalam UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dalam peraturan tersebut bahwasanya pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang hal ini dilimpahkan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Setiap daerah nya, selaras dengan pasal 4, 5, 6 dan 7, Anggaran dasar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Pembinaan secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, atau kinerja individu atau kelompok agar mencapai tujuan tertentu. Pembinaan biasanya melibatkan pemberian bimbingan, pelatihan, motivasi, serta pengawasan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki.

Menurut Miftah Thoha (2003:7-9) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil ataupun pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknis, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

Adapun menurut Santoso S (2005:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, agar pembinaan dapat berjalan baik, yaitu:

Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat indikator masalah yang ditemukan sebagai berikut;

1. Belum optimalnya bentuk kegiatan pemberian bimbingan yang dilakukan secara rutin oleh Komite Nasional Pemuda Nasional Indonesia terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda di Kota Banjar itu sendiri.

Dimana dalam hal ini pemberian bimbingan yang dilakukan sangat penting dalam proses pembinaan untuk organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

1. Pemberian Bimbingan

Pemberian Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada Individu. Pemberian Bimbingan bertujuan agar yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan secara optimal. Dengan Pemberian Bimbingan kita dapat

menjalani proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, pengarahan, perwujudan, serta penyesuaian diri, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Pemberian bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda secara terus menerus agar dapat mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga dapat mengarahkan Organisasi Kepemudaan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Analisis Faktor Pemberian Bimbingan Dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Banjar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial berdasarkan pandangan dan pengalaman partisipan.

Menurut Sugiyono (2017:9), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara utuh dinamika peningkatan kapasitas kerja perangkat desa yang tidak dapat diukur secara statistik, tetapi

justeru dimaknai melalui narasi dan realitas pengalaman informan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara bebas namun tetap terarah. Observasi digunakan untuk memperkuat data dengan mengamati langsung kondisi pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kota Banjar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang,

Penelitian ini mengacu pada teori Santoso (2005:52), yang menyatakan bahwa:“ Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, agar pembinaan dapat berjalan baik.”

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, indikator pemberian bimbingan terbagi dalam dua aspek utama, yaitu:

1. Adanya proses bimbingan dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan dan pemuda sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Adanya pembaharuan dalam proses bimbingan atau pendampingan kepada organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Santoso (2005:52), keberhasilan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pemuda

dapat diukur melalui dimensi pemberian bimbingan, yang di dalamnya mencakup indikator proses bimbingan sesuai aturan yang berlaku dan pembaharuan metode bimbingan. Namun, hasil penelitian lapangan di KNPI Kota Banjar menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut belum tercapai optimal, sehingga diperlukan pengembangan indikator untuk memperkuat efektivitas pembinaan.

1. Indikator Proses Bimbingan sesuai Aturan yang Berlaku.

Adanya pemberian bimbingan dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan dan pemuda sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bentuk pembinaan dan pengawasan dari organisasi atau Lembaga terkait agar organisasi kemasyarakatan dan pemuda berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dan observasi bahwa indikator ini belum terpenuhi karena proses bimbingan tidak berlangsung secara terstruktur dan berkesinambungan. Untuk itu, indikator ini perlu dikembangkan menjadi:

Kejelasan struktur program bimbingan, meliputi perencanaan, jadwal, materi, dan evaluasi. Keterlibatan aktif OKP dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bimbingan, sehingga materi yang diberikan sesuai kebutuhan aktual. Pemantauan dan evaluasi berkala, yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana bimbingan berdampak pada peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Melihat dari beberapa temuan di lapangan dimana beberapa anggota organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang seharusnya merasakan bimbingan tersebut tidak merasakannya berkaitan dengan hal tersebut Santoso (2005:52) mengemukakan dimana di salah satu dimensi pemberian bimbingan merupakan hal penting yang harus tercapai dalam melaksanakan pembinaan. Dengan demikian hasil yang didapat dari observasi dan wawancara di lapangan belum sejalan dengan pendapat ahli yang dikemukakan. Dengan demikian dari hasil penelitian di lapangan belum sejalan dengan pendapat ahli yang dikemukakan di atas, oleh karena itu Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Banjar harus lebih mempersiapkan hal tersebut agar dalam hal ini yaitu pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan pemuda bisa berjalan

2. Indikator Pembaharuan Proses Bimbingan.

Dalam teori Santoso, pembaharuan penting untuk menghindari monoton nya proses pembinaan. Namun, di lapangan, pembaharuan KNPI belum dirasakan signifikan oleh OKP. Oleh karena itu, indikator ini perlu diperluas menjadi:

Inovasi metode bimbingan, misalnya mengombinasikan pendekatan tatap muka, diskusi kelompok, coaching, dan platform digital. Penyesuaian konten bimbingan dengan isu aktual kepemudaan dan

perkembangan teknologi, agar materi lebih relevan. Peningkatan partisipasi kolaboratif, di mana pembimbing dan peserta bimbingan bersama-sama merumuskan solusi serta strategi pengembangan organisasi.

Adanya pembaharuan dalam proses bimbingan kepada organisasi kemasyarakatan dan pemuda merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas, kemandirian, dan relevansi organisasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya pembaharuan dalam proses bimbingan tersebut bisa dikatakan belum optimal, karena temuan di lapangan masih banyak yang tidak merasakan pembaharuan tersebut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, berkaitan dengan hal tersebut, Santoso (2005:52) mengemukakan dalam proses pembinaan bahwa pembaharuan merupakan hal penting dikarenakan harus adanya pembaharuan merupakan hal penting dikarenakan harus adanya pembaharuan agar dalam pelaksanaan pembinaan tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Dengan demikian dari hasil penelitian di lapangan belum sejalan dengan pendapat ahli yang dikemukakan di atas.

3. Integrasi Kedua Indikator dalam Praktik Pembinaan

Pengembangan indikator tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi

juga sebagai pedoman operasional bagi KNPI. Dengan mengintegrasikan indikator proses bimbingan dan pembaharuan, KNPI dapat:

- 1) Memastikan bimbingan berjalan sesuai regulasi yang berlaku
- 2) Meningkatkan relevansi dan daya tarik kegiatan pembinaan.
- 3) Menumbuhkan kemandirian dan kapasitas adaptif OKP terhadap perubahan lingkungan sosial.

Dengan pengembangan indikator ini, diharapkan pembinaan OKP oleh KNPI Kota Banjar dapat bergerak dari sekadar program rutin menjadi proses penguatan kapasitas yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso (2005).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses bimbingan oleh KNPI Kota Banjar belum berjalan secara optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah anggota OKP yang seharusnya memperoleh manfaat dari kegiatan bimbingan tidak merasakan adanya proses tersebut. Kondisi ini tidak sejalan dengan pandangan Santoso (2005:52) yang menegaskan bahwa pemberian bimbingan merupakan salah satu dimensi penting yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu, KNPI Kota Banjar perlu melakukan perencanaan yang lebih matang agar kegiatan pembinaan terhadap OKP dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.

Selanjutnya, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pembaharuan dalam proses bimbingan belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar anggota OKP tidak merasakan adanya pembaharuan metode atau pendekatan dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh KNPI. Padahal, menurut Santoso (2005:52), pembaharuan merupakan aspek krusial dalam pembinaan guna menghindari repetisi dan meningkatkan relevansi kegiatan pembinaan dengan kebutuhan terkini organisasi. Dengan demikian, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dan implementasi, sehingga diperlukan upaya penguatan inovasi metode bimbingan agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis pemberian bimbingan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kota Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Analisis pemberian bimbingan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kota Banjar belum optimal khususnya dalam hal ini dibuktikan dengan 2 indikator yang sudah diteliti, dimana dari 2 indikator tersebut semuanya belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaan pemberian bimbingan dalam pembinaan organisasi

kemasyarakatan dan pemuda Indonesia sendiri dirasa belum mampu memberikan pembinaan yang sesuai dengan indikator-indikator yang penulis pakai.

Banyak hambatan-hambatan yang terjadi pada pemberian bimbingan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kota Banjar, yaitu belum adanya kejelasan program yang mendukung akan kegiatan pemberian bimbingan bagi organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang dilakukan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia itu sendiri, selanjutnya mengenai komunikasi internal DPD Komite nasional Pemuda Indoneisa itu sendiri yang bias dikatakan tidak harmonis sehingga mengakibatkan keberlangsungan DPD Komite Nasioanal Pemuda Indoensia Kota Banjar perioderisasi hari ini patut di pertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Mangunharjana. (1991).
Pembinaan, Arti dan Metodenya.
Jakarta
- Davis, K. dan Newstrom John W.
(2002). Perilaku Dalam
Organisasi, Terjemahan Juniati,
Jakarta: Erlangga.
- Kreitner, Robert, and Kinicki, Angelo,
(2003), Perilaku Organisasi,
Dalam: Early Suandy
(penterjemah), Jakarta: Salemba
Empat.
- Kurniasari, L. (2004). Pengaruh
Komitmen Organisasi dan Job

Scurity terhadap Intensitas Turn
Over di PT. Indo C, Disertasi Ilmu
Manajemen, Program
Pascasarjana, Universitas
Airlangga.

Thoha. (2011). Perilaku Organisasi
Konsep Dasar dan Perilakunya.
Jakarta: Rajawali Press. Thoha.